

MENKKRITISI KURVA ADOPSI INOVASI ROGERS (1983): MENCARI JALAN KELUAR DARI KEMANDEGAN INOVASI

Oleh: Iwan Setiawan

Pendahuluan

Secara historis empiris, umur penyuluhan pertanian di Indonesia sudah 99 tahun (1905-2004), atau 189 tahun jika dihitung dari awal pendirian Kebun Raya Bogor (1815). Suatu masa yang semestinya sudah meremehkan penyuluhan pertanian sebagai kelembagaan yang matang dan siap, seperti halnya penyuluhan pertanian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, Jepang, Taiwan, dan lainnya. Kecenderungannya, penyuluhan pertanian Indonesia semakin tenggelam. Sementara “*Better Farming, Better Business, Better Living, Better Environment, and Better Community*” tinggal selogan, karena kenyataannya sebagian besar petani tetap berada pada kondisi subsistensi. Lebih celakanya, pada saat penyuluhan pemerintah melemah, informasi yang dibutuhkan petani tidak serta merta tereliminasi oleh media massa, penyuluh swasta atau semi swasta, asosiasi petani atau kelompok tani, perguruan tinggi, maupun lembaga swadaya masyarakat.

Meskipun informasi pertanian dari media massa ada tetapi sangat minim, penyuluh pertanian pemerintah tetap tepuruk dan keterkaitannya dengan petani dan peneliti (triangulasi) semakin menunjukkan kesenjangan yang serius (World Bank, 1985; Kaimowitz, 1990), formulator (penyuluh dari perusahaan swasta) cenderung mengejar kepentingan mereka yang dapat bersifat eksploitatif dan destruktif (Roling, 1990), LSM yang hubungannya semakin kuat dengan masyarakat bawah sebagian besar lemah dalam bidang teknik pertanian (Chambers *et al.*, 1989), Pusat Informasi Pasar dan Pertanian (PIP) belum efektif, dan Kelompok Tani atau Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) belum bisa diandalkan (van den Ban dan Hawkins, 1995).

Padahal bagi petani, informasi (atau inovasi) yang terkait dengan pertaniannya adalah kebutuhan yang bersifat dinamis. Apalagi pasca Revolusi Hijau petani menghadapi permasalahan yang sangat kompleks, seperti kerusakan lingkungan, resurgensi, erosi genetik, penurunan produktivitas lahan, perubahan iklim, ketergantungan atas pupuk dan pestisida sintetis, perubahan pola tanam, pemasaran, pencemaran, dan sebagainya, yang dampaknya akan dirasakan oleh petani, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Reijntjes, *et al.*, 1992).

Beban petani Indonesia ternyata tidak semakin ringan dengan berkembangnya sektor industri, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya, bahkan cenderung semakin berat. Sebagai pihak yang dibebani untuk menyediakan kecukupan pangan bagi 210 juta jiwa lebih penduduk Indonesia, petani harus merangkak dalam himpitan kebijakan (pencabutan subsidi, ledakan produk impor akibat kurangnya proteksi, dan polusi politik), konversi lahan, pencemaran lingkungan, degradasi mutu lahan, resurgensi, banjir, kekeringan, fluktuasi pasar, dan involusi. Beban petani semakin bertambah berat seiring dengan digulirkannya isu-isu global yang dituangkan dalam berbagai skema perjanjian perdagangan bebas.

Namun sejak Robetson (1971), Geertz (1983), Rogers (1983), Scott (1993), hingga van den Ban dan Hawkins (1996), petani tetap didudukkan sebagai pihak yang salah, karena lamban. Padahal sudah sejak semula para aktor sosial mengatakan bahwa petani itu sesungguhnya tidak bodoh, berdaya juang tinggi, rasional dalam menjalankan usahatani, sangat responsif dan siap mengusahakan komoditas apa saja yang dipandang akan memberikan keuntungan kepadanya. Adapun keterlambatan atau keengganan petani untuk mengadopsi suatu inovasi, bukan disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka atas inovasi tersebut, tetapi lebih disebabkan oleh lambat, tidak sesuai, dan kurang lengkapnya informasi yang disampaikan kepada petani. Bagi petani di jaman sekarang ini, penyuluhan tidak terlalu dipersoalkan, yang penting pasarnya terjamin dan fasilitasnya terjangkau, petani pasti mengejar prasyaratnya.

Meskipun implementasi penyuluhan pertanian di Indonesia terjebak dalam rekayasa sosial dengan prinsip dipaksa, kapaksa, terpaksa, dan biasa yang digulirkannya selama program revolusi hijau, namun penyuluhan pertanian sedikit banyak telah membawa perubahan pada perilaku petani. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh petani, maka perubahan perilaku dan daya adaptasi petani pun berjalan lebih cepat lagi, sementara penyuluh malah melemah. Bahkan ketika teknologi komunikasi dan informatika berkembang pesat, penyuluh masih berkuat dengan “Metode Tetesan Minyak”. Pada perkembangannya, ketika negara-negara maju mulai menerapkan swastanisasi penyuluhan dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi bagi pembangunan pertanian, penyuluh malah melembagakan dan terjebak dalam teori adopsi inovasi Rogers (1983). Kondisi tersebut terus terbawa meski pendekatan pembangunan pertanian sudah bergeser ke agribisnis. Kecenderungannya, kelembagaan penyuluhan swasta dan semi swasta pun terbawa arus teori Rogers. Kondisi seperti ini pada kenyataannya kurang dikritisi, padahal jelas-jelas bisa membawa petani Indonesia tetap tertinggal, rugi, dan tidak beranjak dari subsistensi. Apalagi dalam arus informasi, permintaan, dan perubahan selera atau gaya hidup yang berjalan cepat seperti sekarang ini.

Menyoal Kurva Adopsi Inovasi Rogers

Konsepsi Rogers adalah kenyataan proses adopsi inovasi di negara-negara dunia ketiga pada era sebelum dan hingga 1983-an. Suatu kondisi yang jauh berbeda dengan era 1990-an atau sekarang, Abad 21. Kenyataan proses difusi dan adopsi inovasi Rogers, adalah kenyataan saat itu yang sesungguhnya tidak ditujukan untuk danut sepanjang masa (*universal*), tetapi suatu kondisi yang oleh Roling (1990), Kaimowitz (1990), Rivera (1991), dan Swanson (1998) dianalisis sebagai kondisi sementara yang akan berubah seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi/informatika dan model-model pembangunan. Jika Rogers memiliki pemikiran untuk menjadikan teorinya sebagai acuan, kenapa pada saat itu dia tidak menyajikan keragaan difusi dan adopsi inovasi di negara-negara maju, seperti Amerika, Jerman, Belanda, Prancis, dan lainnya, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi negara-negara dunia ketiga untuk mengikutinya. Ini pun mengundang pertanyaan, adakah misi kapitalisasi dibalik teori difusi dan adopsi inovasi Rogers?

Secara hakiki, teori Rogers memang tidak salah, namun kehadiran teori tersebut yang kemudian diadopsi secara total dan dianut secara kaku hingga diuniversalkan, telah menjebak bangsa ini kedalam kemandegan inovasi. Distribusi informasi dan inovasi yang terkait dengan pertanian seakan-akan diwajibkan mengikuti alur pikir Rogers, implikasinya

sebagian besar petani kita selalu ketinggalan beberapa langkah oleh petani negara lain. Secara sosial, budaya, dan kelembagaan, teori tersebut telah pula mempertahankan stratifikasi dan diskriminasi petani dalam relasi atas-bawah dan negara atas-desa. Ini adalah sisi yang tidak pernah dikritisi oleh para akademisi, para ahli dan praktisi penyuluhan dan pembangunan sumberdaya manusia pertanian di Indonesia. Kecenderungannya, konsepsi difusi dan adopsi inovasi Rogers ditaklidi sebagai teori yang wajib diberlakukan dalam kegiatan penyuluhan pertanian, kapan dan dimana saja sepanjang masa.

Sejak Program Bimbingan masal (Bimas), Intensifikasi masal, hingga era agribisnis sekarang ini, penyuluhan pertanian masih tetap mengagungkan model difusi dan adopsi inovasi Rogers. Tidakkah kita perhatikan bagaimana teknologi komunikasi dan informatika berkembang pesat, bagaimana kelembagaan-kelembagaan penyelia (*provider*) tumbuh dan berkembang dengan cepat, bagaimana kesisteman agribisnis berperan, bagaimana swasta dan semi swasta berkembang, serta bagaimana responsif dan kosmopolitnya petani. Perubahan-perubahan tersebut merupakan sinyal positif bagi perkembangan dunia penyuluhan pertanian. Jika pada era sebelum 1990-an pendekatan difusi dan adopsi inovasi Rogers masih relevan, itu wajar mengingat teknologi komunikasi dan akses petani terhadap berbagai sumberdaya --terutama informasi-- pada saat itu masih lemah.

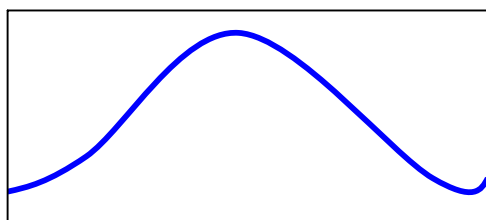
Kita semua tahu bahwa perubahan sosial dan perkembangan teknologi komunikasi telah pula mempengaruhi dan mempercepat arus pemikiran petani, termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Tahapan-tahapan adopsi yang oleh Rogers diseting dalam ruang dan waktu yang cukup lama, kini tidak berlaku lagi. Petani-petani sekarang dapat dengan cepat melampui tahapan-tahapan tersebut, permasalahannya seringkali informasi yang dibutuhkan oleh petani tidak disediakan oleh sumber-sumber informasi yang ada. Celaknya, respon dan pergerakan petani yang cepat tidak diimbangi dengan keragaman dan mutu layanan dari sumber informasi. Sementara kondisi sumber informasi yang sudah lama ada, yaitu penyuluh pemerintah sudah semakin tumpul, apatis, stagnan, fatalism, dan tidak berprestasi di mata petani.

Kenyataan penyuluhan pertanian di Indonesia terfokus kepada penyuluh-penyuluh pemerintah. Padahal di Inggris (Axinn dan Torat, 1972) penyuluhan dan penyampaian masalah petani kepada Menteri Pertanian sudah dilakukan oleh Serikat Petani Nasional (*Farmers Union*). Satu hal yang menarik dari pengalaman Inggris adalah, adanya kelompok-kelompok penyuluh berdasarkan karakteristik tertentu, sebagai contoh Kelompok Petani Muda (*Young Farmer Club*) yang disamping berperan memberikan penyuluhan kepada anggotanya juga menjadi wadah pembinaan petani muda. Di Taiwan penyuluhan dilaksanakan dengan tiga sistem, yaitu perusahaan, pemerintah, dan Asosiasi Petani. Kidd, Lamers, dan Hopman (1998) mencatat bahwa penyuluhan di Selandia Baru (dilaksanakan secara komersial penuh), di Belanda (sebagian biaya ditanggung oleh petani), di Jerman (swastanisasi penuh, semi swasta, subsidi dari asosiasi petani, dan sistem *voucher*), di Denmark (jasa penyuluh disumbang oleh petani), dan sebagainya. Di Indonesia, swastanisasi penyuluhan pertanian berjalan lambat, meskipun sudah dengan eksplisit memberlakukan kebijakan agribisnis. Padahal kondisi sumberdaya penyuluh pemerintah Indonesia benar-benar payah, termasuk mereka-mereka yang berstatus sebagai PPS dan PPM. Kondisi penyuluhan Indonesia semakin parah ketika keterkaitan (*link*) antara peneliti, penyuluh, dan petani tersumbat.

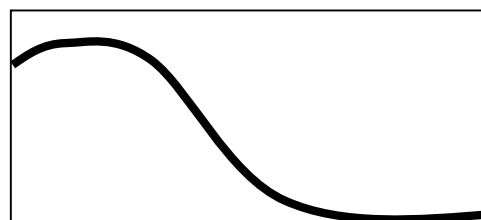
Dampak dari pengadopsian konsep Rogers di Abad ini adalah meningkatkan peluang mayoritas petani kedalam kerugian risiko dan ketidakpastian. Perubahan *trend* gaya hidup, selera, dan pola konsumsi telah menyebabkan cepatnya perubahan inovasi dan permintaan atas suatu produk. Jika kondisi tersebut direspon dengan pendekatan teori difusi dan adopsi inovasi Rogers, maka sebagian besar kelas pengadopsi (*early and late majority*) tidak banyak menikmati keuntungan, mungkin hanya golongan *inovator* dan *early adopter* yang akan menikmati keuntungan. Lebih jauh lagi, pangsa pasar yang lebih luas bisa dikuasai negara lain yang pergerakannya jauh lebih cepat dalam merespon pasar.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka kita harus berusaha menggeser atau merubah kurva adopsi inovasi Rogers (Gambar 1). Jika petani kita ingin maju dan mendapat keuntungan yang berarti, maka kita harus berusaha menciptakan kondisi dimana sebagian besar petani masuk kepada golongan *inovator* (golongan perintis atau pelopor) dan *early adopter* (golongan penerap dini). Dengan demikian, dalam segala hal petani tidak akan ketinggalan atau terlambat (Gambar 2). Prasyaratnya, tentu harus mengoptimalkan sumberdaya dan faktor-faktor pendukung proses tersebut, termasuk faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi menurut Rogers dan Shoemaker (1983).

Langkah-langkah untuk mewujudkannya adalah: 1) Menegakkan Undang-Undang Penyiaran bagi media massa; 2) Swastanisasi Penyuluhan Pertanian; 3) Meningkatkan Partisipasi Media Komunitas; 4) Mentautkan kembali peneliti-penyuluh-swasta; 5) Memperbaiki Pendekatan Pendokumentasian dan Pengelolaan Inovasi; 6) Mengefektifkan Penyuluh Pemerintah; 7) Mengembangkan kelembagaan petani; 7) Meningkatkan dan Mengefektifkan Pemberdayaan Petani; dan sebagainya.



Gambar 1. Klasifikasi Rogers



Gambar 2. Klasifikasi Baru

Mentautkan Inovasi Lokal dan Inovasi Global

Kita hidup di Abad pengetahuan dan informasi yang penuh dengan peluang dan ancaman. Abad yang memberikan peluang yang sama bagi yang lemah dan yang miskin untuk menjadi kuat dan kaya. Namun, peluang bagi melebarnya kesenjangan antara bangsa yang kaya dengan yang miskin juga semakin terbuka. Itu semuanya sudah jelas akan terjadi, sama seperti halnya peningkatan jumlah penduduk, krisis air, konversi lahan, dan kelangkaan sumberdaya alam (*scarcity*). Langkah kita adalah harus membangun sumberdaya manusia yang berkelanjutan, karena ia akan menentukan sukses atau gagal seseorang atau suatu bangsa. Informasi dan kreativitas (*intangible elements*) merupakan senjata utama untuk berkompetisi, itu lebih penting daripada sekedar *tangible element*. Kreativitas lokal menjadi yang utama, namun perlu disinergikan dengan budaya-budaya impor (yang baik-baik) yang sudah ditransfer ke dalam budaya lokal. Bagi semua itu, perlu

dibangun fasilitas yang lengkap sebagai jembatan semua lapisan masyarakat untuk mengakses berbagai sumberdaya produktif secara global (Kim Dae-jung, 2001).

Bagi Jepang, India, Singapura, Cina, Korea, Malaysia, dan Taiwan yang investasi pembangunan sumberdaya manusia dan fasilitasnya sudah tidak diragukan lagi di Asia, globalisasi informasi diyakini sangat potensial memberikan manfaat atau keuntungan kepada semua bangsa. Oleh karena itu, wajar jika mereka lebih transparan dan optimis dengan Visi 2020-nya. Adapun masalah daya saing yang menjadi jargon di Abad 21 ini, sesungguhnya mereka sudah tangani. Karena pada hakekatnya ia bersemayam pada aras kosmos (individu-individu bangsa). Kreativitas berinovasi untuk menghasilkan dan mengelola inovasi merupakan komoditas andalan mereka untuk memenangkan persaingan. Globalisasi informasi merupakan wahana untuk menempatkan inovasi lokal menjadi inovasi global. Adalah suatu prestasi besar jika kreativitas dan inovasi lokal produktif suatu negara mampu mewarnai dunia, karena dengan cepat ia akan merajai dunia (mengglobal).

Globalisasi informasi sesungguhnya merupakan jendela dunia bagi siapa saja yang ingin mencari dan mendapatkan peluang. Namun bagi negara yang bangsa dan fasilitasnya belum menunjang, maka sudah dipastikan akan lebih banyak kecolongan dan menjadi bulan-bulanan (terancam) negara lain, sebut saja Indonesia. Negara yang kaya akan sumberdaya alam dan menjadi pasar potensial, ternyata lebih banyak dimanfaatkan oleh negara lain. Globalisasi informasi tidak banyak dimanfaatkan, meski teknologi informasinya terkuasai, namun karena kreativitas berinovasi “bangsanya (baca: pengelola negara)” lemah, maka lebih banyak diwarnai dunia ketimbang mewarnai dunia. Ironi, inovasi-inovasi lokal yang potensial pun banyak yang hilang, tenggelam, atau dicuri orang. Jadi jangan takut untuk berinovasi menjaga dan membesarkan inovasi lokal yang sudah ada saja sudah kedodoran. Memang tidak ketinggalan dengan informasi dan teknologi global, namun karena kurang didukung dengan data-data dan budaya kerja, maka teknologi informasi pun menjadi tidak bermakna. Kecenderungan bangsa ini terjebak dan ketergantungan pada inovasi luar. Memang itu tidak salah, tetapi jika tidak diimbangi atau disinergikan dengan inovasi lokal kita bisa tetap berada di bawah bayang-bayang kekuasaan negara dan bangsa lain (*order-takers*).

Menyoal Distorsi Distribusi Inovasi

Persoalan distribusi menjadi menarik untuk dicermati bukan dari sisi linguistiknya, tetapi dari sisi pragmatismenya, yaitu ketika terjadi reduksi atau distorsi atas konsepsi dasarnya dalam tataran aplikasinya, yaitu ketika terjadi ketidaksesuaian atau kesenjangan antara harapan --terbagikan dan tersalurkannya inovasi secara efektif kepada sasaran-- dengan kenyataannya --hanya sebagian atau tidak terbagikan dan tidak tersalurkannya inovasi kepada sasaran. Tegasnya, ketika inovasi yang dibagikan atau disalurkan tidak sampai atau hanya sampai sebagian kepada yang berhak menerimanya. Jika didekonstruksi lebih detail, inovasi merupakan konsep yang berdimensi ganda, artinya bisa berupa fisik (kasat mata) dan bisa juga berupa non-fisik atau yang dibendakan (abstrak). Inovasi merupakan segala sesuatu yang menyangkut ide, cara-cara atau pun objek yang dianggap ‘baru’ bagi seseorang. Terminologi ‘baru’ tidak semata-mata dalam ukuran waktu sejak inovasi ditemukan dan diterapkan. Rogers dan Shoemaker menyatakan bahwa suatu yang ‘baru’ itu merupakan masalah persepsi yang bersifat subyektif, artinya suatu inovasi dianggap telah ‘usang’ bagi orang lain, tetapi merupakan sesuatu yang dianggap ‘baru’ oleh yang

lainnya. Inovasi bisa berupa hasil penelitian mutakhir, bisa juga pengetahuan lokalit (van den Ban dan Hawkins, 1999).

Kapitalisme dan Distorsi Distribusi

Sudah sejak semula para aktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya mengejawantahkan kata distribusi secara praktis menjadi kawasan yang rawan distorsi dalam taraf-teraf tertentu. Hanya pada tahap prakapitalisme, fenomenanya tidak menggejala atau menjelma menjadi fakta sosial, mungkin karena istilah distribusi bukan produk modernisasi. Distorsi distribusi baru menjadi fakta sosial ketika pemikiran-pemikiran Comte, Spencer, dan Darwin, menjelma menjadi ideologi masyarakat modern. Pada era itulah, secara nyata yang dikhawatirkan para aktor itu dimanipulasikan dalam ruang krisis kapitalis.

Distorsi distribusi terjadi bukan dalam konstelasi linguisiknya, tetapi dalam entitas pragmatismenya yang memuncak pasca kapitalisme dan utilitarian. Nicholas Garnham memprediksi bahwa pada era tersebut posisi proses distribusi lebih penting daripada proses produksi, alasannya karena distribusi menjadi sumber penumpukan modal dan kekuasaan. Proses distribusi inilah yang kemudian ketika berjalan, berhadapan dengan kepentingan akumulasi modal, dan kemudian pada saat yang sama pula sering dianggap sebagai sumber kerugian karena adanya berbagai bentuk malpraktek.

Menurut Marx, malpraktek ini terjadi karena etika kapitalis mereduksi nilai-nilai kemanusiaan menjadi nilai-nilai ekonomi yang kalkulatif. Kekhawatiran para pencinta kapitalis akan tidak maksimalnya keuntungan atas balas jasa, kerja, modal, dan nilai-nilai menyebabkan maraknya malpraktek --irasionalitas-- dalam ruang distribusi. Suap dan juga pemerasan (*distorsion payment*) merupakan kenyataan dalam kehidupan sistem distribusi lokal, nasional, maupun global, baik distribusi informasi, barang, uang, maupun jabatan, dalam masyarakat kapitalis.

Marx dalam tulisannya yang bertitel "*The Logic of Marx*" mewanti-wanti bahwa distorsi distribusi akan membudaya pada masyarakat kapitalis abad modern. Pada jamannya, distorsi distribusi akan dipandang sebagai kewajaran --bahkan ideologi-- menuju integrasi pasar global, tidak lagi dipandang sebagai patologi sosial. Pada negara-negara dunia ketiga (plasma), fenomenanya akan sangat menakutkan, karena perilaku-perilaku abnormal kapitalisme akan bersimbiosis dengan karsa dan daya juang (*n-ach*) bangsa yang sudah lemah karena dilemahkan oleh kaum kapitalis.

Distorsi Distribusi di Negara Dunia Ketiga

Secara historis empiris, proses pewartisan malpraktek dalam distribusi di negara dunia ketiga diorganisir, dikomunikasikan, dan dicekakkan secara sengaja oleh kaum borjuis kepada aktor-aktor elit puritan, baik dalam birokrasi, legalitas, maupun administrasi. Akibatnya, distorsi distribusi yang semula hanya merupakan ideologi partikular masyarakat kapitalis, menjelma menjadi ideologi total yang diklaim sebagai kebenaran yang pasti. Ini jelas berbahaya, karena ideologi acapkali dipakai secara meluas oleh golongan elit yang mapan untuk menjelaskan dan melegitimasi penggunaan kekuasaan serta kontrol maupun status privilese mereka (Kinloch, 1981).

Pada era 1970-an, pewajaran malpraktek sudah mulai merata membudaya di negara-negara dunia ketiga, termasuk di Indonesia. Pada saat itu pada taaf-taraf tertentu komunitas sosial yang mendambakan keadilan birokrasi, legalitas, dan adminsitras distribusi mulai terpuruk dalam rasionalitas kuantifikasi. Kondisi tersebut semakin menggejala ketika relasi-relasi publik yang oleh Jurgen Habermas disebut sebagai kolonisasi dan yuridikalisasi dunia kehidupan (*life-world*) semakin meningkat.

Semula para aktor sosial ragu ketika Weber mengatakan distorsi distribusi sebagai urat nadi kapitalisme. Namun setelah berabad-abad distorsi distribusi dianut sebagai senjata ampuh oleh kaum kapitalis untuk menaklukkan negara-negara dunia ketiga, baru sadar bahwa itu adalah fakta sosial. Begitu pun di jaman modern sekarang ini, malpraktek dalam distribusi yang sangat dicaci oleh komunitas kapitalis di negerinya, secara implisit masih dilegalisasi sebagai metodologi ekspansi dan penaklukkan pengusaha-pengusaha atau bangsa-bangsa di negara dunia ketiga. Hanya karena sudah terinspirasi oleh tesis Adam Smith lewat *invisible hand*-nya, maka prakteknya menjadi sangat halus.

Implikasinya, proses-proses sosial, ekonomi, politik, dan budaya di negara-negara dunia ketiga senantiasa terpragmentasi dalam pormasi sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya yang kropos. Kondisi ini semakin memburuk ketika adopsi modernitas oleh negara dunia ketiga cenderung terpolarisasi pada pragmen-pragmen modernitas yang justru dijadikan perangkat oleh kapitalis, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, konsumerisme dan gaya hidup *western*.

Itulah kenyataan yang tidak nyata (semu), kapitalisme telah menggeser ide-ide sosial humanis dengan rasionalitas materialisme, singkatnya ekonomi di puja bagai dewa. Jauh-jauh hari Weber melukiskan bahwa di abad modern agama dan birokrasi yang abstrak pun akan dibendakan dan dikuantitatifkan sebagai komoditas ekonomis. Sebagai kebutuhan masyarakat modernitas, birokrasi pun diklaim akan eksis dalam arti luas mengekspansi kebudayaan, praktek dan keyakinan kita. Praktek-praktek yang sangat birokratis kalkulatif, dan adminsitratif akan merembes, berakar, dan menjelma menjadi perilaku abnormal dalam kosmos, kelaskelas, dan institusi negara. Implikasinya, keadilan, administrasi, jiwa sosial dan rasa iba tereduksi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi yang kalkulatif yang melembaga dalam diri, isntitusi, dan pasar global. Setiap proses-proses diciptakan menjadi birokratis dan kalkulatif agar memberikan keuntungan maksimal atas jasa-jasa pribadi atau institusi, akibatnya berkembang ilegalisasi atau malpraktek dalam distribusi, seperti penggelapan, penyelundupan, penyimpangan, dsb.

Apa yang diramalkan oleh Marx, Weber, dan Habermas, kini menjadi kenyataan di negara-negara dunia ketiga, seperti halnya di Indonesia. Hampir setiap hari, persoalan yang terkait dengan distorsi distribusi mengisi kolom-kolom media cetak maupun elektronik. Setiap membicarakan “distribusi” di Indonesia, kita akan segera dibanjiri oleh seabreg ragam persoalan, baik persoalan distribusi pangan (terutama musim kemarau), distribusi sembako, distribusi pupuk, distribusi lahan bakar, distribusi anggaran, distribusi bantuan kemanusiaan, distribusi tenaga kerja, distribusi kredit, distribusi kursi politik, distribusi jabatan, distribusi angkutan, distribusi pedagang kaki lima, distribusi kewenangan, distribusi lahan, maupun distribusi hukum. Singkatnya, segala hal yang berbau distribusi di Indonesia terdiagnosa mengandung persoalan, baik bagi kategori-kategori sosial, ekonomi, politik, budaya, maupun kebangsaan. Hanya fenomenanya ada yang terbuka dan ada yang

laten. Fenomena yang kedua seingkali menjadi bom waktu, padahal fenomena yang terbuka pun sulit untuk ditanggulangi.

Kenapa demikian? Karena proses distribusi di Indonesia diciptakan sedemikian longgar oleh para kapitalis lokal, nasional, maupun internasional bagi aktor-aktor kejahatan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan budaya untuk melakukan distorsi atau malpraktek. Maksimalisasi keuntungan dan kekuasaan, melegalisasi tatanan yang indisipliner yang dideduksi secara serampangan sebagai kelajiman mekanisme pasar global. Ketidakberdayaan para pejuang keadilan dalam memperjuangkan mekanisme normal, tampaknya semakin mengukuhkan keyakinan dan klaim kaum kapitalis atas budaya malpraktek --ideologinya-- dalam proses distribusi. Pada perkembangannya, para pejuang keadilan semakin menampakkan sikap skeptis dan fatalisme. Akibatnya, budaya yang jelas-jelas menyimpang menjadi rujukan --sebagai kebenaran semu-- masyarakat kelas atas, kelas menengah, dan sebagian kaum proletar yang tadinya selalu mengusung kebenaran. Mirip seperti kepasrahan hidup atas takdir Tuhan.

Anehnya, kebenaran semu --memasyarakatnya distorsi distribusi-- yang membudaya di Indonesia terfragmentasi dari pangkal budayanya (kapitalisme), kemudian menjelma menjadi warna tersendiri yang sangat kejam. Transaksi-transaksi, birokrasi-birokrasi, administrasi-administrasi, pelayanan-pelayanan, dan jasa-jasa yang terkait dengan distribusi, penuh dengan warna relasi-relasi mekanis, arogansi, diskriminasi, dan kanibalisme, tak terkecuali dalam tatanan hukum, pendidikan, suku, agama, ras, dan tatanan lain yang berperspektif gender.

Prediksi Marx dan Weber tentang fenomena malpraktek dalam distribusi di negara-negara dunia ketiga yang akan lebih menakutkan dibandingkan dengan di negara-negara yang menjadi skemator kapitalisme -- termasuk eskalasinya dalam individu-individu, kelas-kelas, dan institusi-institusi sosial-- kini ternyata menjadi kenyataan. Indonesia yang masuk nominator negara paling korup di dunia, ternyata tingkat korupsi pada tataran distribusinya sangat tinggi. Kejamnya, di negara yang katanya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan ini, distorsi distribusi tidak hanya terjadi pada proses-proses dan sektor-sektor strategis saja, tetapi juga terjadi dalam distribusi sosial seperti distorsi distribusi bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam, bantuan untuk orang-orang miskin, zakat, wakaf, sembako, dsb. Siapa yang melakukannya? Adalah individu-individu dan institusi-institusi yang sangat birokratis dan kalkulatif, yang meski eksistensinya sudah melembaga, namun di negeri kita masih dijuluki sebagai "Oknum".

Distorsi distribusi di negara kita, terutama oleh oknum golongan elitis sudah seperti dilegalisasi. Ada dan hidup dalam setiap relung-relung kehidupan, sehingga meski optimis namun agak pesimis untuk dapat dieliminasi, apalagi distribusi hukum sendiri masih mengalami distorsi. Meski tidak diutarakan secara eksplisit, namun kondisi tersebut sangat dikehendaki oleh negara-negara kapitalis. Mereka yang tampak seperti mencaci malpraktek dalam distribusi di negara-negara dunia ketiga, pada kenyataannya sangat senang. Mereka mengadopsinya menjadi instrumen konstruksi politis untuk mengeksploitasi berbagai potensi negara dunia ketiga dan mengendalikannya lewat proteksi produk-produk atau investasinya. Kecenderungannya, mereka memelihara patologi kapitalis di negara dunia ketiga demi melanggengkan dominasi dan hegemoni keyakinan yang sangat populer, yaitu Darwinisme Sosial.

Persoalan distribusi bukan gejala konformisme, karena secara nyata tidak dikehendaki oleh norma dan etika sosial. Distorsi distribusi sebenarnya merupakan fakta sosial abnormal yang tidak universal. Oleh karena itu, meski patologinya sudah akut, namun bukan berarti masalah tersebut tidak bisa ditanggulangi. Masyarakat banyak (proletarian), intelektual, dan para pejuang keadilan lainnya yang kian mengecam ragam malpraktek distribusi, optimis dapat dijadikan sebagai legitimasi untuk mereduksinya. Namun demikian, distribusi hukum haruslah menjadi perhatian utama, karena ia akan menjadi pangkal bagi perbaikan distribusi lainnya, disamping pembenahan internal pada diri kelompok, dan institusi-institusi negara.

Penanggulangan persoalan distribusi informasi di Indonesia jelas sangat mendesak, jika tidak maka dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang dapat melanggengkan krisis ekonomi, politik, budaya, dan keterpurukan bangsa. Secara teoretis, perlu juga membangun landasan baru dalam memecahkan problem sosial yang ada. Untuk implementasinya, kita patut bertanya kepada nurani dan akal sehat kita --seluruh rakyat dan pemimpin bangsa ini, akankah kita membiarkan distorsi distribusi kekal dalam relung-relung kehidupan bangsa ini?

Catatan Akhir

Mendominankan kelompok Inovator dan Early Adopter adalah kondusif bagi Indonesia untuk dapat mengejar ketertinggalan dan melepaskan diri dari ketergantungan atas inovasi luar. Informasi, kreativitas, fasilitas, dan *political will* merupakan senjata untuk meningkatkan daya saing yang akan menjadi jargon di Abad ini. Mensinergikan inovasi lokal dengan inovasi global merupakan langkah awal (prakondisi) atau jembatan untuk mengglobalkan inovasi lokal.

Daftar Pustaka

- Chambers, R., Pacey, A, and Thrupp, L.A. (1989). *Farmer First: Farmer Innovation and Agricultural Research*. London: Intermediate Technology Publications.
- Departemen Pertanian (2002). *Kebijaksanaan Nasional Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian*. Departemen Pertanian, Jakarta.
- Departemen Pertanian (2002). *Profil Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian*. Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Jakarta.
- Kaimowitz, D. (1990). *Making The Link: The Agricultural Research/Technology Transfer Interface in Developing Nations*. Boulder, CO: Westview Press.
- Rivera, W.M., and Gustafson, D.J. (1991). *Agricultural Extension: Worldwide Institutional Evolution and Forces for Change*. Elsevier Science Publishing, Amesterdam.
- Roling, N. (1990). *The Agricultural Research-Technology Transfer Interface: A Knowledge System Perspective*. Boulder, CO: Westview Press.
- Scott, J. (1993). *Perlawanan Kaum Tani*. LP3ES Press, Jakarta.
- Soewardi, H. (1972). *Respon Masyarakat Desa Terhadap Modernisasi Produksi Pertanian Terutama Padi*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Van den Ban and Hawkins, H.S. (1999). *Penyuluhan Pertanian: Terjemahan Agricultural Extension oleh Agnes Dwina Herdiasti*. Kanisius, Yogyakarta.
- World Bank (1985). *Agricultural Research and Extension: An Evaluation of The World Bank's Experience*. Washington, DC: World Bank.

